

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**(Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan)**



Skripsi Oleh:

MARFITA MULYAWATI

NIM 01071003078

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

Tahun 2011

R 21277
21741

352.407
Mar
e
01/1 → 112500
2011

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**(Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan)**



Skripsi Oleh:

MARFITA MULYAWATI

NIM 01071003078

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

Tahun 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARFITA MULYAWATI
NIM : 01071003078
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR (STUDI KASUS
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 17 Oktober 2011 Ketua :



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 19580828 198810 1 001

Tanggal 17 Oktober 2011 Anggota :



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP 19640901 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marfita Mulyawati
Nim : 01071003078
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan).

Pembimbing

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc, A
Anggota : Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
Tanggal diujikan : 31 Oktober 2011

adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, November 2011

Yang memberi pernyataan,



Marfita Mulyawati

NIM.01071003078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

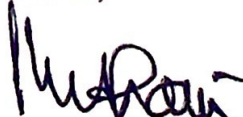
NAMA : MARFITA MULYAWATI
NIM : 01071003078
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR (STUDI KASUS
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN)

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 31 Oktober 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 31 Oktober 2011

Ketua,



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 19580828 198810 1 001

Anggota,



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak
NIP 19640901 199403 2 001

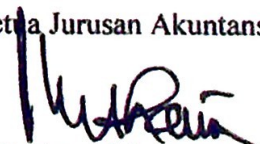
Anggota,



Ika Sasti Ferina, SE, Ak
NIP 197802010 200112 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 19580828 198810 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- * Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga (H.R. Muslim)*
- * Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah anda raih, namun kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. (Orison Swett Marden)*

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

- › Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang*
- › Yang selalu kusayangi Ayah dan Ibuku terima kasih atas segalanya.*
- › Kakak dan adikku tercinta terima kasih dukungan dan perhatiannya.*
- › Yang tersayang terima kasih selalu memberikan motivasi.*
- › Teman-teman yang selalu memberikan semangat*
- › Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana.

Penulisan skripsi ini terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih secara tulus kepada Rektor Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ekonomi Unsri, dan Ketua Jurusan Akuntansi FE Unsri yang telah memberikan kesempatan dan berbagai kemudahan kepada saya.

Rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kedua pembimbing, yaitu Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak dan Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak. yang penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya di sela-sela kesibukannya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, ayahanda Ir. H. Syahriar RK, M.Sc dan ibunda Ir. Hj. Maimunah, M.Si, beserta kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan dukungan moril dan materil, nasehat, semangat serta doanya kepada penulis.

Semoga atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dari pembaca selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Palembang, November 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjangkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan)" sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan sebagai Ketua Pembimbing Skripsi.
4. Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai Anggota Pembimbing Skripsi.
5. Ika Sasti Ferina, SE, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai anggota penguji tamu pada Ujian Komprehensif.
6. Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kepala Badan dan staf Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

9. Kepala Bagian dan staf Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Ayahanda Ir. H. Syahriar RK, M.Sc tersayang, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhitung, serta dukungan yang bersifat fisik, mental, dan juga spiritual.
11. Yang tercinta ibunda Ir. Hj. Maimunah, M.Si, yang menjadi ibu, panutan, sahabat yang selalu ada dan memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, semangat, dukungan, kekuatan, motivasi, dan segenap ketulusan di setiap waktu.
12. Kakak-kakakku tersayang, Marisa Maharini, M. Umar Muhariansyah, Efran Yudia, yang menjadi contoh dan motivasi untuk meraih kesuksesan.
13. Adik-adikku yang pintar dan sangat saya sayangi, Diana Amelita, M. Ali Amriansyah, Enita Harianti, dan Refira Kurniati, M. Permadi Yosa Nugraha, Novia Rahmawati, dan yang paling bungsu, Fitri Isnati, yang menjadi semangat dan senyum yang mewarnai hari-hariku.
14. Keluarga besarku, Bunda Siti Nafisah, Acik Abdul Majid, Om Sutiyo, Ummi Mistrul Aini, Tante Yuniastini, Ayah Zafrullah, Nenek Masitoh, dan Nenek kami tersayang Almh. Nyai Halimah.
15. Kedua sahabatku, Nadiyah dan Jelita Sirait, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dan semangat.
16. Al Hadi Haq, yang menjadi sahabat yang baik dan kakanda yang saya sayangi dan selalu sabar membantu, menemani, menyayangi dan mengasihi dengan tulus.
17. Teman-teman International Class 2007, Winda, Titania, Rizka, Sylvia, Indah, Lina, Ciska, Jansen, Anggraini, Cinyi, Bambang, dan teman-teman lainnya.
18. Teman-teman sejawat seangkatan Lia Safitri, Siska, Ruth, Desi, Rony, Dina, Darman, Popi, Palupi, dan teman-teman lain di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

19. Adik-adik tingkat angkatan 2008, 2009 dan 2010 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bisma, Asep, Herpin dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Kakak-kakak tingkat angkatan 2006, 2005 dan 2004 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dayat, Wahyu, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
21. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
22. Semua pihak yang tak tersebutkan yang telah banyak membantu saya.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

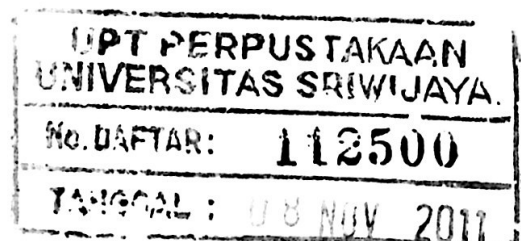
Penulis,

Marfita Mulyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5.2. Rancangan Penelitian.....	11
1.5.3. Responden	11

x



1.5.4. Data dan Metode Pengumpulan Data	12
1.5.5. Metode Analisis Data.....	13
1.6. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah	15
2.2. Pengelola Keuangan Daerah.....	19
2.2.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
2.2.2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2.2.3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	21
2.2.4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB).....	22
2.2.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK SKPD)	23
2.2.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.....	24
2.2.7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.....	25
2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	25
2.4. Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD	30
2.5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	40
2.6. Penelitian Terdahulu	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH	
3.1. Sejarah Singkat Ogan Ilir	42
3.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	43
3.3. Iklim dan Topografi	44
3.4. Kependudukan	45
3.5. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.....	46

3.5.1. Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.....	46
3.5.2. Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.....	47
3.5.3. Sasaran Kinerja yang Ingin Dicapai	48
3.6. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten ogan Ilir	50
3.6.1. Urusan Ketahanan Pangan	53
3.6.2. Sub Urusan Penyuluhan Pertanian	55
3.7. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	56
 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	62
4.2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	64
4.2.1. Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	64
4.2.2. Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Prosedur Akuntansi SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	75
4.2.3. Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	78
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Prosedur Penatausahaan Penerimaan.....	58
Gambar 3.2.	Prosedur Penatausahaan Pengeluaran.....	59
Gambar 3.3.	Prosedur Akuntansi dan Pertanggungjawaban.....	60

ABSTRAK

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, pengakuntansian terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulis menggunakan pendekatan survey, yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan telah melakukan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal penetapan pejabat dan penatausahaan pengeluaran, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, namun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan, walaupun mengalami keterlambatan dalam penyusunannya.

Kata kunci : Pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

ABSTRACT

Each regional work unit (SKPD) does the financial administration of the regency and accounting of each economic transaction that occur in the unit, to make financial statements. This study aims to evaluate the suitability of administration, accounting, and reporting financial statements in Ogan Ilir Regency, especially in SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan with Permendagri No. 13 of 2006. This study uses descriptive method, in the form of case studies. The author uses survey approach, specifically the inquiry carried out to obtain the facts of the existing symptoms and seek factual information. The result of study showed that Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan has made the administration in accordance with Permendagri No. 13 of 2006, but there are still some shortcomings in the terms of determination of officials and administration of expenses, while for the preparation of financial statements has not been fully in accordance with Permendagri No. 13 of 2006, but financial statements of Ogan Ilir Regency has presented on time so that it can be used for groups of users of financial statements for decision making, despite the preparation of financial statement is late.

Keywords : Financial management of regency, regional work unit (SKPD), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat telah membawa beberapa perubahan dalam kehidupan politik nasional dan juga di daerah. Tuntutan reformasi dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah membawa dampak terhadap hubungan pemerintah daerah dan pusat. Adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi. Dengan adanya salah satu agenda reformasi, setiap daerah semakin tertantang memanfaatkan setiap peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki.

Program otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas publik lebih responsif dan efisien terhadap kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Semua hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah di masing-masing daerah.

Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan dan strategi untuk memberdayakan dan memandirikan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kendala kewenangan dan kapasitas kemandirian yang dikeluhkan, bisa teratasi dan merupakan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas,



baik melalui kebijaksanaan perencanaan program maupun aspek kebijaksanaan keuangan daerahnya.

Kebijakan dan strategi di bidang pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin untuk membelanjai dan mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah harus mempunyai cukup sumber dana yang potensial di daerah, dengan tetap menjamin agar pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional. Sementara itu, kebijakan dan strategi di bidang pengeluaran pada prinsipnya diarahkan untuk memberikan pengaruh positif yang besar kepada perekonomian daerah. Namun, dengan adanya tuntutan perkembangan zaman, maka pemerintahan dan otonomi daerah bisa mengalami pergeseran ataupun perubahan dimana selama ini sistem pemerintahan lebih banyak mengarah pada sentralistik.

Tujuan utama dengan diselenggarakannya otonomi daerah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi kebijaksanaan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan lebih penting. Untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya daerah itu sendiri dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Kinerja keuangan ini dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah, dan kinerja ini harus berorientasi pada

kepentingan publik sehingga dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Saat ini, kinerja dan pengelolaan keuangan daerah memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam memberdayakan pemerintah daerah. Dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah ini, tuntutan yang menjadi issue utama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan rakyat (*public money*) secara baik agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Transparansi sistem Pemerintah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi pada era reformasi ini, terutama transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang wajib disusun oleh masing-masing pemerintah daerah dengan menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan

Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas sebagai perangkat daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Masing-masing SKPD di tiap daerah diberikan alokasi dana (anggaran) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Kepala SKPD yang didelegasikan sebagian wewenang dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) akan diminta untuk membuat pertanggungjawaban atas wewenang yang dilaksanakan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban yang diminta bukanlah dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tetapi berupa laporan keuangan. Dalam pengelolaan laporan keuangan ini, SKPD menjalankan proses akuntansi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat selaku entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan mendasar. Kedua Undang-Undang tersebut mencantumkan tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah

daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Kepmen No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ini, yang selanjutnya disebut dengan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga melihat perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kabupaten Ogan Ilir (OI) merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003. Dalam hal ini, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir akan ditempuh dalam program pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025. Salah satu arah Kebijakan strategisnya adalah memberikan kewenangan otonomi desa yang seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan dalam mengelola sumber daya.

Berkaitan dengan hal ini, secara tidak langsung Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang diperoleh dengan baik dan dikembangkan agar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Ogan Ilir mempunyai hak atau diberi otonom baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing – masing.

Sesuai dengan Permendagri 13, pemerintah daerah Ogan Ilir telah diwajibkan untuk membuat APBD yang sesuai dengan peraturan tersebut, begitu juga dalam penatausahaan, pengakuntansian, pelaksanaan dan pelaporan. Namun berdasarkan hasil penelitian awal, pemerintah daerah Ogan Ilir belum dapat menyelesaikan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri 13. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir yang belum dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini laporan keuangan yang saat ini masih dapat dicapai oleh Pemerintah daerah Ogan Ilir adalah opini Wajar Dengan Pengecualian.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pengelolaan keuangan daerah Ogan Ilir dengan mengacu pada Permendagri 13 dan Permendagri 59 diharapkan dapat mewujudkan desentralisasi keuangan daerah yang baik di daerah Ogan Ilir sehingga dapat memberdayakan dan memandirikan daerah Ogan Ilir. Dengan mengimplementasikan Permendagri 13 ini, diharapkan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas menjadi semakin besar. Namun untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar

sesuai Permendagri 13 dan Permendagri 59 ini tidaklah mudah karena kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri 13 dan Permendagri 59 ini harus terlebih dahulu diselesaikan.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah daerah Ogan Ilir sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Ogan Ilir, maka penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Ogan Ilir (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir telah melakukan

penatausahaan pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006?

2. Apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir telah menyelenggarakan pengakuntansian pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006?
3. Apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Untuk menilai kesesuaian penatausahaan pada pengelolaan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2. Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3. Untuk menilai kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006?

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat:

1. Dijadikan bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah Ogan Ilir dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Bagi pemerintah daerah Ogan Ilir dan pihak terkait, dapat dijadikan sebagai bahan motivasi untuk bekerja dan bersaing lebih baik lagi.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
4. Dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa lain mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertempat pada kantor Pemerintah Daerah Ogan Ilir. Dalam hal ini peneliti akan meneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Adapun yang akan diteliti adalah penatausahaan keuangan, pelaksanaan kebijakan

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di SKPD tersebut.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian survey. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 telah dilaksanakan pada SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kantor Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

Penelitian ini juga bersifat penelitian kasus dan lapangan yang merupakan suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya (dalam hal ini SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kantor Pemerintah Daerah Ogan Ilir).

1.5.3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat-pejabat yang ada di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan oleh penulis berdasarkan jabatan yang dijabat oleh responden tersebut.

1.5.4. Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer ini diambil secara langsung dengan cara melakukan melalui penelitian langsung ke pejabat tertentu di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, peneliti akan membaca berbagai literatur, artikel dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian, dan menggunakannya sebagai pedoman dalam membantu kelancaran penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada beberapa pejabat di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam metode ini digunakan dua cara yaitu :

a. Langsung

Prosedur pengumpulan data secara langsung yang digunakan adalah metode survei dengan cara peneliti datang langsung ke SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kantor Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

b. Tidak langsung

Dalam cara tidak langsung ini, metode yang akan digunakan adalah kuisisioner yang merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan alat bantu berupa daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kantor Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

1.5.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis secara: Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan yang diajukan yakni Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Ogan Ilir (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan).

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran jelas, maka penulis akan menguraikannya ke dalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan evaluasi masalah dalam penelitian ini seperti pengelolaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan analisis transaksi pada keuangan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi umum Pemerintah Daerah Ogan Ilir khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai objek yang diteliti mulai dari struktur organisasi, visi, misi dan kondisi keuangan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu data-data yang berhubungan dengan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 di Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Bagan Aliran Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*. Fakultas Ekonomi Universitas.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
- Naim. Anni. 2006. *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (Permendagri 13) di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007*. Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Ogan Ilir. 2005. Diambil pada tanggal 24 Juni 2011 dari <http://oganalirkab.go.id/index.php/kecamatan/itemlist/category/2-sejarah-ogan-ilir>.
- Pemerintah Daerah Ogan Ilir. 2005. Diambil pada tanggal 19 Juni 2011 dari <http://dalbangoganilir.blogspot.com/2009/09/profil-kabupaten-ogan-ilir>.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 2011. *Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Bupati Ogan Ilir*. Kabupaten Ogan Ilir
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24. 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58. 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pusdiklat BPKP. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah I*. Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pegurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Solihin, Dadang. 2007. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel* ,yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel (diakses tanggal 22 Februari 2011)
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul. H. 2008. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Diambil Pada Tanggal 5 September 2011.